

Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan

(*Food Security and Vulnerability Atlas- FSVA*)

Tahun 2022



**DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN BUNGO**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

I	PENDAHULUAN	1
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Kerangka Konsep Ketahanan Pangan dan Gizi	2
	1.3. Metodologi	5
2	KETERSEDIAAN PANGAN	9
	2.1. Lahan Pertanian	9
	2.2. Produksi Pangan	10
	2.3. Sarana dan Prasarana Ekonomi	14
	2.4. Strategi Pemenuhan Ketersediaan Pangan	15
3	AKSES PANGAN	17
	3.1. Tingkat Kesejahteraan Rumah tangga	17
	3.2. Akses Penghubung /Transportasi	18
	3.4. Strategi Peningkatan Akses Pangan	20
4	PEMANFAATAN PANGAN	21
	4.1. Akses Air Bersih	21
	4.2. Akses Tenaga Kesehatan	22
	4.3. Dampak dari Status Kesehatan	23
5	KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN KOMPOSIT	28
	5.1. Kondisi Ketahanan Pangan	28
	5.2. Faktor Penyebab Kerentanan Pangan	30
6	REKOMENDASI KEBIJAKAN	32

KATA PENGANTAR

Begitu pentingnya permasalahan pangan mendorong setiap negara untuk berusaha mewujudkan ketahanan pangan nasional yang berkelanjutan, sehingga mampu dan dapat menjamin terpenuhinya kebutuhan pangan sampai dengan tingkat perseorangan. Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional yang kuat, tentu diperlukan informasi ketahanan pangan yang akurat dan tertata dengan baik. Hal ini diamanatkan oleh Undang-Undang No. 18 tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah No 17 tahun 2017 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi. Berkaitan dengan hal tersebut, sejak tahun 2015, Badan Ketahanan Pangan dan World Food Programme (WFP) mengembangkan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan/Food security and Vulnerability Atlas (FSVA). FSVA menyediakan analisis yang dapat dijadikan acuan bagi pengambilan keputusan dalam perencanaan program dan kebijakan ketahanan pangan dan Gizi.

Penyusunan Peta Kabupaten Bungo Merupakan upaya untuk mempertajam analisis FSVA Nasional dan Propinsi yang telah disusun sebelumnya. Guna mendukung terwujudnya pembangunan ketahanan pangan terutama ketersediaan pangan setiap saat untuk mengantisipasi kemungkinan kerentanan pangan, peta FSVA merupakan alat monitor secara dini kerawanan pangan kronis dan transien.

Semoga peta ini dapat dijadikan pedoman dan acuan bagi seluruh OPD yang terkait dalam penyusunan kegiatan tentang Pangan di Kabupaten Bungo

Muara Bungo, Juli 2022

BUPATI BUNGO



H. MASHURI, S.P., M.E.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Oleh Tim Teknis

1. Ketersediaan informasi ketahanan pangan yang akurat, komprehensif, dan tertata dengan baik sangat penting untuk mendukung upaya pencegahan dan penanganan kerawanan pangan dan gizi, karena dapat memberikan arah dan rekomendasi kepada pembuat keputusan dalam penyusunan program, kebijakan, serta pelaksanaan intervensi di tingkat pusat dan daerah. Penyediaan informasi diamanahkan dalam UU No 18/ 2012 tentang Pangan dan PP No 17/2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi yang mengamanatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk membangun, menyusun, dan mengembangkan Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang terintegrasi.
2. Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas – FSVA*) merupakan peta tematik yang menggambarkan visualisasi geografis dari hasil analisa data indikator kerentanan terhadap kerawanan pangan. Informasi dalam FSVA menjelaskan lokasi wilayah rentan terhadap kerawanan pangan dan indikator utama daerah tersebut rentan terhadap kerawanan pangan.
3. FSVA Kabupaten merupakan peta yang menggambarkan situasi ketahanan dan kerentanan pangan wilayah desa. Indikator yang digunakan dalam penyusunan FSVA merupakan turunan dari tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Pemilihan indikator didasarkan pada: (i) keterwakilan 3 pilar ketahanan pangan (ii) tingkat sensitifitas dalam mengukur situasi ketahanan pangan dan gizi; dan (iii) ketersediaan data tersedia secara rutin untuk periode tertentu yang mencakup seluruh wilayah desa. Enam indikator digunakan dalam penyusunan FSVA Kabupaten.
4. **Indikator pada aspek ketersediaan pangan** adalah (1) Rasio luas lahan baku sawah terhadap luas lahan total; (2) Rasio jumlah sarana dan prasarana ekonomi terhadap jumlah rumah tangga. **Indikator pada akses pangan** adalah (1) Rasio penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap total jumlah penduduk; (2) Desa dengan akses penghubung kurang memadai. **Indikator pada aspek pemanfaatan pangan** adalah: (1) Rasio rumah tangga tanpa akses air bersih; (2) Rasio tenaga kesehatan terhadap penduduk.
5. Desa/kelurahan diklasifikasikan dalam 6 kelompok ketahanan pangan dan gizi berdasarkan pada tingkat keparahan dan penyebab dari situasi ketahanan pangan dan gizi. Desa/kelurahan di Prioritas 1, 2 dan 3 merupakan wilayah rentan pangan dengan klasifikasi Prioritas 1 tingkat rentan pangan tinggi, Prioritas 2 rentan pangan sedang, dan

prioritas 3 rentan pangan rendah. Desa/kelurahan di Prioritas 4, 5, dan 6 merupakan wilayah tahan pangan dengan klasifikasi prioritas 4 tahan pangan rendah, prioritas 5 tahan pangan sedang, sedangkan prioritas 6 yaitu tahan pangan tinggi.

6. Hasil analisis FSVA 2022 menunjukkan bahwa desa rentan pangan Prioritas 2-3 sebanyak 35 desa dari 153 desa (22,83%) yang terdiri dari Prioritas 2; 11 desa (7,18%) dan Prioritas 3; dan 24 desa (15,68%)
 - A. Prioritas 2 Desa rentan terhadap kerawanan pangan prioritas 2 terdapat di wilayah Kecamatan Pelepat (2 desa), Kecamatan Batin III Ulu (3 desa) dan Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang (1 desa), Kecamatan Pelepat (3 desa), Kecamatan Pelayang (2 Desa) dan Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas (2 Desa).
 - C. Prioritas 3 terdapat di wilayah Kecamatan Pelepat. (4 desa), Kecamatan Rantau Pandan (1 desa), Kecamatan Batin III Ulu (1 desa), Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas (2 desa) dan Kecamatan Limbur Lb Mengkuang(1 desa), Kecamatan Jujuhan (4 desa),Kecamatan Jujuhan Ilir(1 desa), Kecamatan Muko2 Batin VII (1 Desa), Kecamatan Pelepat Ilir (4 desa), kecamatan Tanah Sepenggal (4 Desa) dan Kec. Tanah Tumbuh (1 Desa)
7. Program-program peningkatan Ketahanan Pangan dan Penanganan Kerentanan Pangan Desa diarahkan pada kegiatan:
 - a. Pembukaan lahan sawah baru, pemberian bibit/benih, pupuk, dan pembinaan kelompok tani
 - b. Penyediaan sarana prasarana (membuka Pasar Mingguan, TTI, Toko Sembako)
 - c. Penanganan kemiskinan melalui penyediaan lapangan kerja, padat karya, redistribusi lahan; pembangunan infrastruktur dasar (jalan, listrik, rumah sakit), dan pemberian bantuan sosial; serta pembangunan usaha produktif/UMKM/padat karya untuk menggerakkan ekonomi wilayah
 - d. Peningkatan akses air bersih melalui penyediaan fasilitas dan layanan air bersih; sosialisasi dan penyuluhan
 - e. Penyediaan/penambahan tenaga kesehatan.
 - f. Penyediaan Cadangan Pangan.

Pengesahan Tim Teknis

N A M A	JABATAN	INSTANSI	TANDA TANGAN
Sofyan Ma'as, SP	Ketua	Dinas Ketahanan Pangan	1
Jonni Ali, S.Hut	Anggota	Dinas Ketahanan Pangan	2
M. Radi, SP	Anggota	Dinas Ketahanan Pangan	3
Ishak, SP., MM	Anggota	Dinas Ketahanan Pangan	4
Weni Yunita, SP	Anggota	Dinas Ketahanan Pangan	5
Miranda, S.Km, MPH	Anggota	Dinas Kesehatan	6
Rasidin, S.Sos	Anggota	Dinas Sosial P2KBP3A	7
Dr. Auri AP, S.Sos., M.Si	Anggota	Bappeda	8
Micro Satria Dinata	Anggota	BPS	9
Mc. Dallas Forda, SP	Anggota	Dinas TPHP	10



Dokumentasi Rapat Tim Teknis FSVA
Tahun 2022

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Kabupaten Bungo terdiri dari 17 kecamatan dan 153 desa dan kelurahan dengan total penduduk sebesar 360.906 jiwa (Ducapil 2021). Kabupaten Bungo, Secara geografis terletak di bagian Timur garis khatulistiwa, memanjang dari utara ke selatan di antara 101°27'-102°30' Bujur Timur dan memanjang dari barat ke timur di antara 01°55.'Lintang Selatan. Kabupaten Bungo di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Damas Raya, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Merangin, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Tebo dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kerinci yang memiliki wilayah daratan seluas 521.067 km² atau 521.067 ha dan wilayah perairan (laut) diperkirakan seluas 0 km² atau 0 ha. Secara klimatologis, Kabupaten Bungo memiliki pola tipe curah hujan tipe Basah, yaitu daerah basah memiliki curah hujan lebih dari 3340 mm dan rata per tahun 278.3(*Kabupaten Bungo Dalam Angka, BPS*)

Perekonomian Kabupaten Bungo tergantung pada sektor Pertanian yang masih mempunyai peranan tinggi terhadap PDRB atas dasar harga berlaku. Pada tahun 2021 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, semua sub sektor mengalami peningkatan, sektor pertanian mengalami kenaikan peranan dari 4.133,85(2020) menjadi 4.864,52 (2021). Selain sektor pertanian, sektor yang mengalami kenaikan tahun 2021, adalah sektor pertambangan, yaitu dari 1.645,35 (2020) menjadi 2.665,57(2021) sektor Industri dari 1.152 (2020) menjadi 1.347,20 (2021) dan sektor Listrik dari 12.07(2020) menjadi 15,51(2021) Sementara sektor lainnya juga mengalami peningkatan, ini menunjukkan bahwa masih sangat banyak hal yang harus dilakukan oleh pemerintah dan para pemegang kepentingan (stakeholder) dalam melakukan pembangunan.(*BPS 2022*)

Undang-undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 114 dan Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi Pasal 75 mengamanatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban membangun, menyusun, dan mengembangkan Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang terintegrasi, yang dapat digunakan untuk perencanaan, pemantauan dan evaluasi, stabilisasi pasokan dan harga pangan serta sebagai sistem peringatan dini terhadap masalah pangan dan kerawanan pangan dan gizi.

Informasi tentang ketahanan dan kerentanan pangan penting untuk memberikan informasi kepada para pembuat keputusan dalam pembuatan program dan kebijakan, baik di tingkat pusat maupun tingkat lokal, untuk lebih memprioritaskan intervensi dan program berdasarkan kebutuhan dan potensi dampak kerawanan pangan yang tinggi. Informasi tersebut dapat dimanfaatkan sebagai salah satu instrumen untuk mengelola krisis pangan dalam rangka upaya perlindungan/penghindaran dari krisis pangan dan gizi baik jangka pendek, menengah maupun panjang.

Dalam rangka menyediakan informasi ketahanan pangan yang akurat dan komprehensif, disusunlah Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan/*Food Security and Vulnerability Atlas-FSVA* sebagai instrumen untuk monitoring ketahanan pangan wilayah. Di tingkat nasional FSVA disusun sejak tahun 2002 bekerja sama dengan *World Food Programme (WFP)*. Kerjasama tersebut telah menghasilkan Peta Kerawanan Pangan (*Food Insecurity Atlas - FIA*) pada tahun 2005. Pada tahun 2009, 2015, 2018 disusun Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas – FSVA*).

Sebagai tindak lanjut penyusunan FSVA Nasional disusun pula FSVA Provinsi dengan analisis sampai tingkat kecamatan dan FSVA Kabupaten dengan analisis sampai tingkat desa. Dengan demikian, permasalahan pangan dapat dideteksi secara cepat sampai level yang paling bawah. FSVA kabupaten telah disusun sejak tahun 2012 dan dimutakhirkan pada tahun 2016. Untuk mengakomodir perkembangan situasi ketahanan pangan dan pemekaran wilayah desa, maka dilakukan pemutakhiran FSVA Kabupaten pada tahun 2019.

Seperti halnya FSVA Nasional dan Provinsi, FSVA Kabupaten menyediakan sarana bagi para pengambil keputusan untuk secara cepat dalam mengidentifikasi daerah yang lebih rentan, dimana investasi dari berbagai sektor seperti pelayanan jasa, pembangunan manusia dan infrastruktur yang berkaitan dengan ketahanan pangan dapat memberikan dampak yang lebih baik terhadap penghidupan, ketahanan pangan dan gizi masyarakat pada tingkat desa.

Pengembangan FSVA tingkat desa merupakan hal yang sangat penting, dimana kondisi ekologi dan kepulauan yang membentang dari timur ke barat, kondisi iklim yang dinamis dan keragaman sumber penghidupan masyarakat menunjukkan adanya perbedaan situasi ketahanan pangan dan gizi di masing-masing wilayah. FSVA Kabupaten akan menjadi alat yang sangat penting dalam perencanaan dan pengambilan keputusan untuk mengurangi kesenjangan ketahanan pangan.

1.2. KERANGKA KONSEP KETAHANAN PANGAN DAN GIZI

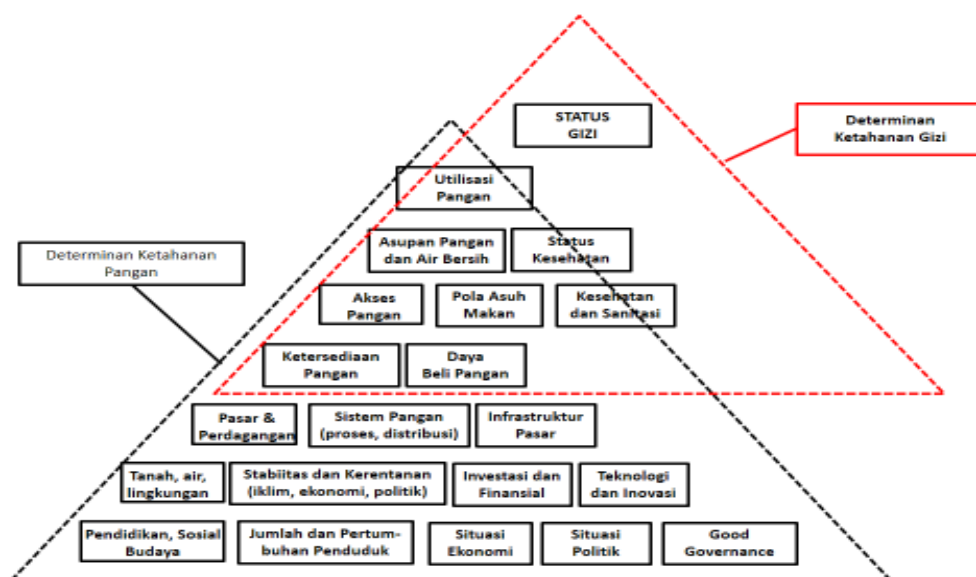
Peran pangan bukan hanya penting untuk memenuhi kebutuhan fisik dasar dan mencegah kelaparan, namun lebih jauh dari itu peran pangan dengan kandungan gizi di dalamnya bagi kecerdasan bangsa dan peningkatan kualitas hidup manusia untuk menghasilkan manusia yang sehat, cerdas, aktif dan produktif seperti disebutkan dalam definisi ketahanan pangan. Kecukupan pemenuhan pangan dalam jumlah dan mutunya berkorelasi dengan produktivitas kerja dan pertumbuhan otak serta kecerdasan dan pada akhirnya berperan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam undang-undang didefinisikan bahwa ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Menimbang

pentingnya ketahanan pangan dalam pembangunan nasional, Bab III Undang-undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 mengamanatkan bahwa Pemerintah harus melakukan perencanaan penyelenggaraan pangan. Pada pasal 6, penyelenggaraan pangan diarahkan untuk mewujudkan kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan.

Definisi ketahanan pangan (*food security*) yang dianut oleh *Food and Agricultural Organisation* (FAO) dan dirujuk oleh UU Pangan saat ini mengacu pada konsep awal *food security* yang dihasilkan oleh *World Food Summit* tahun 1996. Merujuk pada konsep tentang pentingnya *nutrition security* yang diajukan oleh Unicef pada awal tahun 1990an yang menambahkan aspek penyakit infeksi sebagai penyebab masalah gizi disamping ketahanan pangan rumah tangga, maka *International Food Policy Research Institute* (IFPRI) menyebut konsep ketahanan pangan FAO tersebut sebagai *Food and Nutrition Security*. Pada tahun 2012 FAO¹ mengajukan definisi *food security* menjadi *food and nutrition security* untuk menyempurnakan konsep dan definisi sebelumnya.

Upaya FAO ini sejalan dengan upaya *Standing Committee on Nutrition* (SCN), suatu lembaga non struktural yang juga berada di bawah United Nations (PBB) yang pada tahun 2013² juga merekomendasikan penyempurnaan definisi ketahanan pangan (*food security*) menjadi ketahanan pangan dan gizi (*food and nutrition security*). Dalam pemahaman baru ini, perwujudan ketahanan pangan tidak hanya berorientasi pada upaya penyediaan pangan dalam jumlah yang cukup bagi setiap individu, namun juga harus disertai upaya untuk meningkatkan efektivitas pemanfaatan pangan bagi terciptanya status gizi yang baik bagi setiap individu. Dalam konteks ini optimalisasi utilisasi pangan tidak cukup hanya dari kualitas pangan yang dikonsumsi, namun juga harus didukung oleh terhindarnya setiap individu dari penyakit infeksi yang dapat mengganggu tumbuh kembang dan kesehatan melalui kecukupan air bersih dan kondisi sanitasi lingkungan dan higiene yang baik. Kerangka pikir ketahanan pangan dan gizi ini dituangkan dalam Gambar 1.1.



Gambar 1.1. Konsep Ketahanan Pangan dan Gizi
(Sumber: FAO dan UNSCN)

Analisis dan pemetaan FSVA dilakukan berdasarkan pada pemahaman mengenai **ketahanan pangan dan gizi** seperti yang tercantum dalam Kerangka Konsep Ketahanan Pangan dan Gizi (Gambar 1.1). Kerangka konseptual tersebut dibangun berdasarkan tiga pilar ketahanan pangan, yaitu: ketersediaan, akses dan pemanfaatan pangan, serta mengintegrasikan gizi dan kerentanan di dalam keseluruhan pilar tersebut.

Ketersediaan pangan adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri, cadangan pangan, serta pemasukan pangan (termasuk didalamnya impor dan bantuan pangan) apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan. Ketersediaan pangan dapat dihitung pada tingkat nasional, regional, kecamatan dan tingkat masyarakat.

Akses pangan adalah **kemampuan rumah tangga untuk memperoleh** cukup pangan yang bergizi, melalui satu atau kombinasi dari berbagai sumber seperti: produksi dan persediaan sendiri, pembelian, barter, hadiah, pinjaman dan bantuan pangan. Pangan mungkin tersedia di suatu daerah tetapi tidak dapat diakses oleh rumah tangga tertentu jika mereka tidak mampu secara fisik, ekonomi atau sosial, mengakses jumlah dan keragaman makanan yang cukup.

Pemanfaatan pangan merujuk pada **penggunaan pangan oleh rumah tangga dan kemampuan individu** untuk menyerap dan memetabolisme zat gizi. Pemanfaatan pangan juga meliputi cara penyimpanan, pengolahan dan penyiapan makanan, keamanan air untuk minum dan memasak, kondisi kebersihan, kebiasaan pemberian makan (terutama bagi individu dengan kebutuhan makanan khusus), distribusi makanan dalam rumah tangga sesuai dengan kebutuhan individu (pertumbuhan, kehamilan dan menyusui), dan status kesehatan setiap anggota rumah tangga. Mengingat peran yang besar dari seorang ibu dalam meningkatkan profil gizi keluarga, terutama untuk bayi dan anak-anak, pendidikan ibu sering digunakan sebagai salah satu *proxy* untuk mengukur pemanfaatan pangan rumah tangga.

Dampak gizi dan kesehatan merujuk pada status gizi individu, termasuk defisiensi mikronutrien, pencapaian morbiditas dan mortalitas. Faktor-faktor yang berhubungan dengan pangan, serta praktek-praktek perawatan umum, memiliki kontribusi terhadap dampak keadaan gizi pada kesehatan masyarakat dan penanganan penyakit yang lebih luas.

Kerentanan dalam peta ini selanjutnya merujuk pada kerentanan terhadap **kerawanan pangan dan gizi**. Tingkat kerentanan individu, rumah tangga atau kelompok masyarakat ditentukan oleh pemahaman terhadap faktor-faktor risiko dan kemampuan untuk mengatasi situasi tertekan.

Kerawanan pangan dapat menjadi kondisi yang kronis atau transien. **Kerawanan pangan kronis** adalah ketidakmampuan jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan pangan minimum dan biasanya berhubungan dengan struktural dan faktor-faktor yang tidak berubah dengan cepat, seperti iklim setempat, jenis tanah, sistem pemerintahan daerah,

infrastruktur publik, sistim kepemilikan lahan, distribusi pendapatan dan mata pencaharian, hubungan antar suku, tingkat pendidikan, sosial budaya/adat istiadat dll.

Kerawanan pangan transien adalah ketidakmampuan sementara yang bersifat jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan pangan minimum yang sebagian besar berhubungan dengan faktor dinamis yang dapat berubah dengan cepat/tiba-tiba seperti penyakit menular, bencana alam, pengungsian, perubahan fungsi pasar, tingkat hutang dan migrasi. Perubahan faktor dinamis tersebut umumnya menyebabkan kenaikan harga pangan yang lebih mempengaruhi penduduk miskin dibandingkan penduduk kaya, mengingat sebagian besar dari pendapatan penduduk miskin digunakan untuk membeli makanan. Kerawanan pangan transien yang berulang dapat menyebabkan kerawanan aset rumah tangga, menurunnya ketahanan pangan dan akhirnya dapat menyebabkan kerawanan pangan kronis.

1.3. Metodologi

Kerentanan pangan dan gizi adalah masalah multi-dimensional yang memerlukan analisis dari sejumlah parameter. Kompleksitas masalah ketahanan pangan dan gizi dapat dikurangi dengan mengelompokkan indikator *proxy* ke dalam tiga kelompok yang berbeda tetapi saling berhubungan, yaitu ketersediaan pangan, keterjangkauan/akses rumah tangga terhadap pangan dan pemanfaatan pangan secara individu. Pertimbangan gizi, termasuk ketersediaan dan keterjangkauan bahan pangan bergizi tersebar dalam ketiga kelompok tersebut.

Indikator

Kerentanan terhadap kerawanan pangan tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten, memiliki karakteristik masing-masing sehingga tidak semua indikator nasional maupun provinsi dapat digunakan untuk memetakan kerentanan terhadap kerawanan pangan di tingkat kabupaten. Pemilihan indikator FSVA Kabupaten didasarkan pada: (i) hasil review terhadap pemetaan daerah rentan rawan pangan yang telah dilakukan sebelumnya; (ii) tingkat sensitivitas dalam mengukur situasi ketahanan pangan dan gizi; (iii) keterwakilan pilar ketahanan pangan dan gizi; dan (iv) ketersediaan data pada seluruh desa.

Indikator yang digunakan dalam FSVA Kabupaten terdiri dari 6 (enam) indikator yang mencerminkan tiga aspek ketahanan pangan.

Tabel 1.1. Indikator FSVA Kabupaten 2022

Indikator	Definisi	Sumber Data
A. Aspek Ketersediaan Pangan		
Rasio luas baku lahan pertanian terhadap luas wilayah desa	Luas baku lahan pertanian dibandingkan luas wilayah desa	TPH-BUN 2021
Rasio jumlah sarana dan prasarana ekonomi terhadap jumlah rumah	Jumlah sarana dan prasarana ekonomi (pasar, minimarket, toko, warung, restoran dll) dibandingkan	BPS Kabupaten Bungo 2021.

Indikator	Definisi	Sumber Data
tangga	jumlah rumah tangga desa	
B. Aspek Akses terhadap Pangan		
Rasio jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk desa	Jumlah penduduk dengan status kesejahteraan terendah (penduduk dengan tingkat kesejahteraan pada Desil 1) dibandingkan jumlah penduduk desa	Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kab. Bungo 2021
Desa yang tidak memiliki akses penghubung memadai melalui darat atau air atau udara	Desa yang tidak memiliki akses penghubung memadai dengan kriteria: (1) Desa dengan sarana transportasi darat tidak dapat dilalui sepanjang tahun; (2) Desa dengan sarana transportasi air atau udara namun tidak tersedia angkutan umum	Potensi Desa 2020, BPS
C. Aspek Pemanfaatan Pangan		
Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga desa	Jumlah rumah tangga desil 1 s/d 4 dengan sumber air bersih tidak terlindung dibandingkan jumlah rumah tangga desa	Dinas Kesehatan Kab. Bungo 2021
Rasio jumlah tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk desa	Jumlah tenaga kesehatan terdiri atas: 1) Dokter umum/spesialis; 2) dokter gigi; 3) bidan; 4) tenaga kesehatan lainnya (perawat, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga gizi, apoteker/asisten apoteker) dibandingkan jumlah penduduk desa	Dinas Kesehatan Kab. Bungo 2021

Metode Analisis

1. Analisis Indikator Individu

Analisis indikator individu dilakukan dengan mengelompokkan indikator individu kedalam beberapa kelas berdasarkan metode sebaran empiris. Sementara itu data kategorik mengikuti standar pengelompokkan yang sudah ditetapkan oleh BPS.

2. Analisis Komposit

Metodologi yang diadopsi untuk analisis komposit adalah dengan menggunakan metode pembobotan. Metode pembobotan digunakan untuk menentukan tingkat kepentingan relatif indikator terhadap masing-masing aspek ketahanan pangan. Metode pembobotan dalam penyusunan FSVA mengacu pada metode yang dikembangkan oleh *The*

Economist Intelligence Unit (EIU) dalam penyusunan *Global Food Security Index* (EIU 2016 dan 2017) dan *International Food Policy Research Institute* (IFPRI) dalam penyusunan *Global Hunger Index* (IFPRI 2017). Goodridge (2007) menyatakan jika variabel yang digunakan dalam perhitungan indeks berbeda, maka perlu dilakukan secara tertimbang (pembobotan) untuk membentuk indeks agregat yang disesuaikan dengan tujuannya.

Langkah-langkah perhitungan analisis komposit adalah sebagai berikut:

- a. Standarisasi nilai indikator dengan menggunakan *z-score* dan *distance to scale* (0 – 100)
- b. Menghitung skor komposit kabupaten/kota dengan cara menjumlahkan hasil perkalian antara masing-masing nilai indikator yang sudah distandarisasi dengan bobot indikator, dengan rumus:

$$Y(j) = \sum_{n=1}^9 a_i X_{ij} \dots \dots \dots (1)$$

Dimana:

Y_j : Skor komposit kabupaten/kota ke-j

a_i : Bobot masing-masing indikator

X_{ij} : Nilai standarisasi masing-masing indikator pada kabupaten/kota ke-j

Besaran bobot masing-masing indikator dibagi sama besar untuk setiap aspek ketahanan pangan, karena setiap aspek memiliki peran yang sama besar terhadap penentuan ketahanan pangan wilayah. Bobot untuk setiap indikator mencerminkan signifikansi atau pentingnya indikator tersebut dalam menentukan tingkat ketahanan pangan suatu wilayah.

Tabel 1.2 Bobot Indikator Individu

No	Indikator	Bobot
1.	Rasio luas baku lahan sawah terhadap luas wilayah desa	1/6
2.	Rasio jumlah sarana dan prasarana ekonomi terhadap jumlah rumah tangga	1/6
Sub Total		1/3
3.	Rasio jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk desa	1/6
4.	Desa yang tidak memiliki akses penghubung memadai	1/6
Sub Total		1/3
5	Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga desa	1/6
8	Rasio jumlah tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk desa	1/6
Sub Total		1/3

- c. Mengelompokkan desa/kelurahan ke dalam 6 kelompok prioritas berdasarkan *cut off point* komposit. Skor komposit yang dihasilkan pada masing-masing wilayah dikelompokkan ke dalam 6 kelompok berdasarkan *cut off point* komposit. *Cut off point* komposit merupakan hasil penjumlahan dari masing-masing perkalian antara bobot indikator individu dengan *cut off point* indikator individu hasil standarisasi *z-score* dan *distance to scale* (0-100).

$$K(j) = \sum_{n=1}^9 a_i C_{ij} \dots\dots\dots (2)$$

Dimana:

K_j : *cut off point* komposit ke-J

a_i : Bobot indikator ke-i

C_{ij} : Nilai standarisasi *cut off point* indikator ke-I kelompok ke-j

Wilayah yang masuk ke dalam kelompok 1 adalah desa/kelurahan yang cenderung memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi daripada desa/kelurahan dengan kelompok di atasnya, sebaliknya wilayah pada kelompok 6 merupakan desa/kelurahan yang memiliki ketahanan pangan paling baik. Penting untuk menegaskan kembali bahwa sebuah desa/kelurahan yang diidentifikasi sebagai relatif lebih tahan pangan (kelompok Prioritas 4-6), tidak berarti semua penduduk di dalamnya juga tahan pangan. Demikian juga, tidak semua penduduk di desa/kelurahan Prioritas 1-3 tergolong rentan pangan.

3. Pemetaan

Hasil analisis indikator individu dan komposit kemudian divisualisasikan dalam bentuk peta. Peta-peta yang dihasilkan menggunakan pola warna seragam dalam gradasi warna merah dan hijau. Gradasi merah menunjukkan variasi tingkat kerentanan pangan tinggi dan gradasi hijau menggambarkan variasi kerentanan pangan rendah. Untuk kedua kelompok warna tersebut, warna yang semakin tua menunjukkan tingkat yang lebih tinggi dari ketahanan atau kerentanan pangan.

BAB 2

KETERSEDIAAN PANGAN

Undang-undang Pangan No. 18 tahun 2012 mendefinisikan ketersediaan pangan sebagai kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan. Produksi pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk Pangan. Sedangkan cadangan pangan nasional adalah persediaan pangan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk konsumsi manusia dan untuk menghadapi masalah kekurangan pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat. Penyediaan pangan diwujudkan untuk memenuhi kebutuhan dan konsumsi pangan bagi masyarakat, rumah tangga dan perseorangan secara berkelanjutan.

Mayoritas bahan pangan yang diproduksi maupun didatangkan dari luar wilayah harus masuk terlebih dahulu ke pasar sebelum sampai ke rumah tangga. Oleh karena itu, selain kapasitas produksi pangan, keberadaan sarana dan prasarana penyedia pangan seperti pasar akan terkait erat dengan ketersediaan pangan di suatu wilayah.

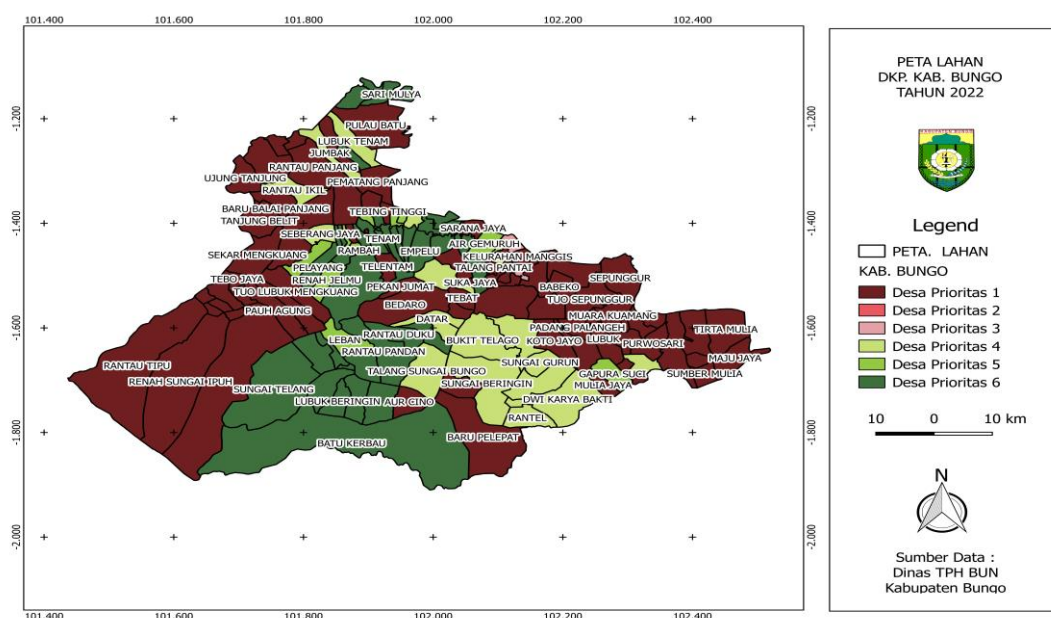
2.1. LAHAN PERTANIAN

Rasio luas baku lahan sawah terhadap luas wilayah kabupaten adalah perbandingan antara luas baku lahan sawah dengan luas wilayah desa. Rasio lahan sawah terhadap luas wilayah desa digunakan sebagai salah satu indikator dalam aspek ketersediaan pangan karena lahan sawah memiliki korelasi yang positif terhadap tingkat ketersediaan pangan dengan mempengaruhi kapasitas produksi pangan³. Oleh sebab itu, semakin tinggi rasio luas lahan sawah terhadap luas wilayah desa maka diasumsikan ketersediaan pangan juga akan semakin baik, begitu pula sebaliknya.

Dari 153 desa di Kabupaten Bungo, 83 desa masuk dalam prioritas 1 (52,24 %), 0 desa prioritas 2 (0 %), 2 desa masuk dalam prioritas 3 (1,30 %). Kecamatan yang memiliki rasio lahan prioritas 1-3 sebagian besar tersebar di Kecamatan Limbur dan Kecamatan Pelepat.

Tabel 2.1 Sebaran rasio luas baku lahan sawah terhadap total lahan berdasarkan prioritas

Prioritas	Rasio lahan sawah	Jumlah Desa	Persentase
1	≤ 0.0000	83	52,24
2	$> 0.0000 - 0.0000$	0	0
3	$> 0.0000 - 0.0024$	2	1,30
4	$> 0.0024 - 0.0243$	19	12,41
5	$> 0.0243 - 0.0449$	10	6,53
6	> 0.0449	39	24,49



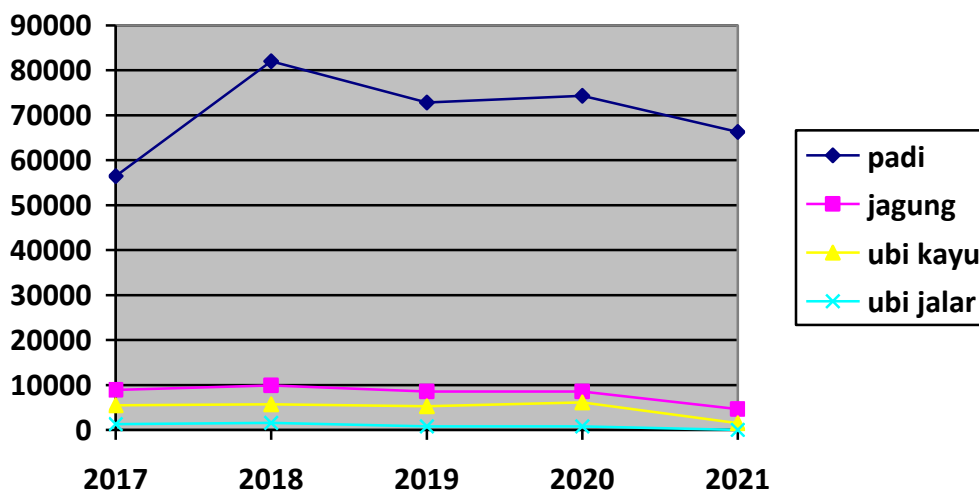
2.2. PRODUKSI

Pemerintah Kabupaten Bungo telah mempromosikan produksi pertanian dan telah mengadopsi beberapa tindakan perlindungan bagi petani. Pertanian (termasuk peternakan, kehutanan, dan perikanan) telah memberikan kontribusi sebesar 3,54 % dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bungo. pada tahun 2022 memberikan peluang yang signifikan untuk berkontribusi dalam meningkatkan ketahanan pangan, penanggulangan kemiskinan, dan dinamika pertumbuhan ekonomi. Padi dan jagung merupakan bahan pokok di Kabupaten Bungo yang menyumbang hampir 90 % dari total produksi serealiala kabupaten. Berdasarkan Tabel 2.2 dan Gambar 2.1, produksi umbi-umbian di Kabupaten Bungo mengalami peningkatan/penurunan sejak tahun 2017. Peningkatan/penurunan ini terutama disebabkan oleh bertambahnya luas tanam dan peningkatan produktivitas. Produksi padi meningkat 357.085 ton selama 5 tahun, yaitu dari pencapaian produksi 56.494 ton tahun 2017 menjadi 71.426 ton. pada tahun 2021.

Tabel 2.2 Produksi Serealiala Pokok dan Umbi-umbian 2017-2021 (Ton)

Serealiala	2017	2018	2019	2020	2021	Rata-rata 5 tahun
Padi	56.494	81.991	72.807	74.367	71.426	71.417
Jagung	8.920	9.882	8.536	8.554	4.629	8.104,2
Ubi Kayu	5.485	5.704	5.291	6.094	1.482	4.811,2
Ubi Jalar	1.259	1.570	814	779	0	884,4

Sumber: TPH-BUN 2017-2021



(Grafik Peningkatan Produksi serealia dan padi-padian)

Tahun 2021, total produksi serealia dan umbi-umbian mencapai 77.537 ton padi, **71.426** ton jagung, **6.305** ton ubi kayu, **1.810** ton dan ubi jalar 119 ton. Total produksi serealia dan laju pertumbuhan produksi tahun 2017-2021 menunjukkan pertumbuhan sebesar 7 %, yaitu dari total produksi tahun 2017 sebesar 72.158 ton menjadi 79.660 ton pada tahun 2021. Sebaran total produksi serealia selama 5 tahun terbesar terjadi pada tahun 2018, yaitu sebesar **99.147** ton dan terkecil pada tahun 2017 sebesar 72.158 ton. Produksi serealia pertahun dan laju pertumbuhannya dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3 Produksi Total Serealia per Tahun dan Laju Pertumbuhan Produksi (2017-2021)

Kecamatan	Produksi Total Serealia					Laju Pertumbuhan 2017 - 2021
	2017	2018	2019	2020	2021	
1.Pelepapat	2.538	5.594	5.784	9.155	5.877	28.948
2.Pelepapat Ilir	2.138	3.363	1.719	1.592	1.366	10.178
3.Bathin II Babeko	20	231	108	2.496	98	2.953
4.Rimbo Tengah	180	261	59	114	231	845
5.Bungo Dani	1.318	1.481	1220	1.751	904	6.674
6.Pasar Muara Bungo	149	102	67	185	26	529
7.Bathin III	4.710	2.736	3.613	4.193	3.218	18.470
8.Rantau Pandan	3.911	6.316	4.342	7.189	8.731	30.489
9.Muko-muko Bathin IV	1.711	1.658	5.489	2.703	1.737	13.298
10.Bathin III Ulu	9.784	13.879	9.403	9.838	10.740	53.644
11.Tanah Sepenggal	17.436	27.646	20.097	20.688	17.014	102.881
12.Tanah Sepenggal Lintas	4.197	11.057	5.790	6.947	9.137	37.128
13.Tanah Tumbuh	6.254	10.772	11.319	9.132	9.166	46.643
14.Limbur Lubuk Mengkuang	201	316	473	578	69	1.637
15.Pelayang	1570	503	22.015	1.686	1.695	27.469
16.Jujuhan	519	440	867	550	796	3.172
17.Jujuhan Ilir	9.139	10.697	13.250	11.003	8.855	52.944
Jumlah	72.158	99.147	87.448	89.800	79.660	428.213

Sumber: THP-BUN 2017-2021

Padi

Produksi padi pada tingkat kecamatan di Kabupaten Bungo selama 5 tahun terakhir (2017-2021) telah dianalisis dan disajikan pada Tabel 2.4. Produksi padi mengalami peningkatan pada tahun 2018 di 4 kecamatan. Peningkatan terjadi di kecamatan Tanah Sepenggal Lintas Produksi padi tertinggi di kecamatan Tanah sepenggal sebesar 27.367 ton pada tahun 2018

Tabel 2.4 Produksi Padi 2017 - 2021 (Ton)

Kecamatan	Padi				
	2017	2018	2019	2020	2021
1.Pelepat	1.140	4.237	4.148	5.072	5.153
2.Pelepat Ilir	35	-	-	-	-
3.Bathin II Babeko	-	-	-	-	-
4.Rimbo Tengah	-	-	-	-	-
5.Bungo Dani	1.142	1.374	1.098	1.247	612
6.Pasar Muara Bungo	-	-	-	-	-
7.Bathin III	4.243	2.501	3.372	3.180	2.874
8.Rantau Pandan	3.093	6.071	4.193	6.985	8.585
9.Muko-muko Bathin IV	597	1.071	4.474	1.480	1.209
10.Bathin III Ulu	7.145	12.276	6.819	8.678	10.446
11.Tanah Sepenggal	16.588	27.367	19.903	20.432	16.937
12.Tanah Sepenggal Lintas	3.570	10.030	5.646	6.655	8.996
13.Tanah Tumbuh	5.723	10.189	11.163	8.800	9.115
14.Limbur Lubuk Mengkuang	-	230	149	264	-
15.Pelayang	1.317	302	1.703	1.359	1.565
16.Jujuhan	143	162	600	371	779
17.Jujuhan Ilir	5.573	6.181	9.539	9.844	5.153
Jumlah	56.494	81.991	72.807	70.173	71.426

Sumber: TPH BUN 2017-2021

Jagung

Pada tahun 2021, produksi jagung mencapai 6.305 ton. Hal ini menunjukkan terjadi Penurunan 24 %. produksi pada tahun 2021 disebabkan adanya pengurangan luas tanam, Sebaran produksi jagung terbesar terjadi pada tahun 2018, yaitu sebesar 9.882 ton. Kontribusi terbesar terjadi di Kecamatan Jujuhan Ilir sebesar 4,512 ton, menyusul Kecamatan Pelepat sebesar 3.468 ton dan terendah Kecamatan Bungo Dani, tanah sepenggal dan jujuhan sebesar 0 ton. Secara rinci produksi jagung tahun 2017-2021 disajikan pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5 Produksi Jagung 2017 - 2021 (Ton)

Kecamatan	Jagung				
	2017	2018	2019	2020	2021
1.Pelepat	1.264	1.134	1.277	3.468	612
2.Pelepat Ilir	821	405	285	167	1.064
3.Bathin II Babeko	-	210	108	990	98
4.Rimbo Tengah	11	6	-	89	93

5.Bungo Dani	-	-	-	27	53
6.Pasar Muara Bungo	44	21	5	61	-
7.Bathin III	358	161	192	577	105
8.Rantau Pandan	651	88	61	68	48
9.Muko-muko Bathin IV	297	66	149	629	141
10.Bathin III Ulu	125	27	313	871	294
11.Tanah Sepanggal	594	211	84	0	-
12.Tanah Sepanggal Lintas	425	763	102	165	61
13.Tanah Tumbuh	165	136	29	120	-
14.Limbur Lubuk Mengkuang	91	21	11	224	-
15.Pelayang	75	21	-	11	17
16.Jujuhan	376	78	201	0	17
17.Jujuhan Ilir	3.425	4.516	3.700	1.083	3.702
Jumlah	8.920	9.882	8.536	8.500	6.305

Sumber THP-BUN 2017-2021

Ubi Kayu

Produksi ubi kayu menurun dari 5.704 ton pada tahun 2018 menjadi 1810 ton pada tahun 2021. Daerah yang merupakan sentra produksi ubi kayu terbesar pada tahun 2018 meliputi kecamatan Pelepat Ilir 2.628 ton, Rincian produksi ubi kayu tahun 2017-2021 disajikan pada Tabel 2.6.

Tabel 2.6 Produksi Ubi Kayu 2017 - 2021 (Ton)

Kecamatan	Ubi Kayu				
	2017	2018	2019	2020	2021
1.Pelepat	80	162	288	440	80
2.Pelepat Ilir	1.282	2.628	1.336	1.086	248
3.Bathin II Babeko	20	21	-	1.500	-
4.Rimbo Tengah	169	171	47	25	138
5.Bungo Dani	143	82	111	477	239
6.Pasar Muara Bungo	105	81	62	124	26
7.Bathin III	109	74	49	436	237
8.Rantau Pandan	167	157	88	136	98
9.Muko-muko Bathin IV	760	396	762	515	354
10.Bathin III Ulu	1.673	940	1.699	208	-
11.Tanah Sepanggal	194	48	98	243	77
12.Tanah Sepanggal Lintas	104	160	42	100	80
13.Tanah Tumbuh	286	447	127	212	51
14.Limbur Lubuk Mengkuang	110	65	313	90	69
15.Pelayang	178	180	203	277	113
16.Jujuhan	-	92	66	179	-
17.Jujuhan Ilir	105	-	-	48	-
Jumlah	5.485	5.704	5.291	4.611	1.810

Sumber: 2017-2021,TPH-BUN

Ubi Jalar

Produksi ubi jalar terbesar selama kurun waktu 5 tahun (2017 - 2021) terjadi pada tahun 2018, yaitu sebesar 1.570 ton. Kecamatan Bathin III ulu merupakan penyumbang terbesar, yaitu sebesar 841 ton, dan Kecamatan Pelepat ilir 330 ton. Rincian produksi ubi jalar tahun 2017 - 2021 disajikan pada Tabel 2.7.

Tabel 2.7 Produksi Ubi Jalar 2017- 2021 (Ton)

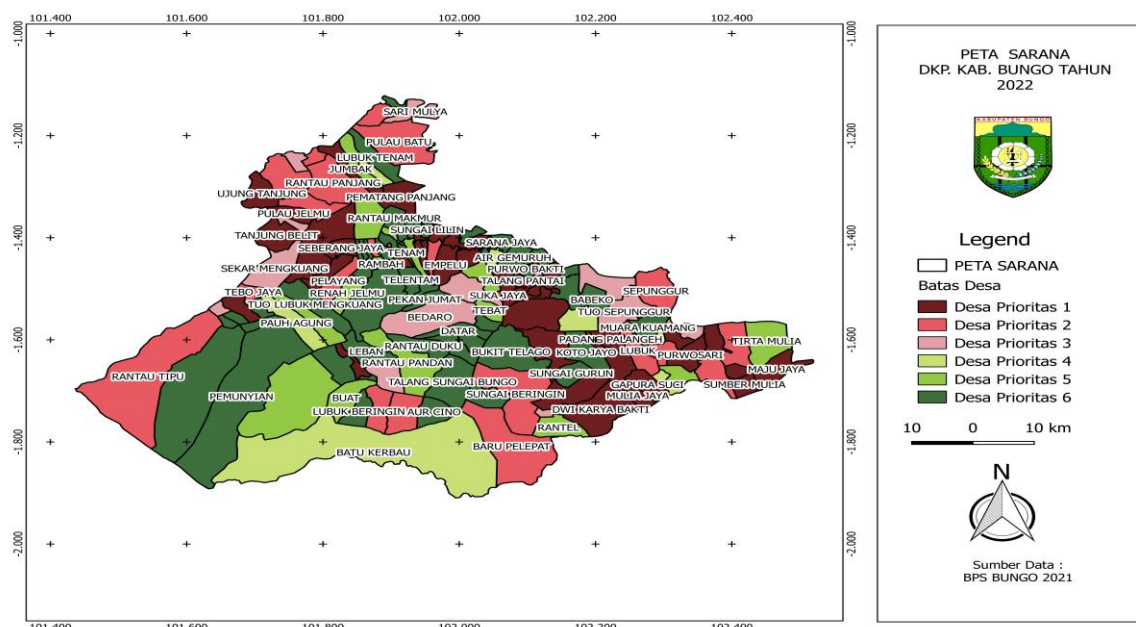
Kabupaten	Ubi jalar				
	2017	2018	2019	2020	2021
1.Pelepat	54	61	71	175	32
2.Pelepat Ilir	-	330	98	339	54
3.Bathin II Babeko	-	-	-	-	-
4.Rimbo Tengah	-	84	12	-	-
5.Bungo Dani	33	25	11	-	-
6.Pasar Muara Bungo	-	-	-	-	-
7.Bathin III	-	77	11	-	-
8.Rantau Pandan	-	-	-	-	-
9.Muko-muko Bathin IV	57	125	104	79	33
10.Bathin III Ulu	841	636	572	81	-
11.Tanah Sepenggal	60	20	12	13	-
12.Tanah Sepenggal Lintas	98	104	-	27	-
13.Tanah Tumbuh	80	-	-	-	-
14.Limbur Lubuk Mengkuang	-	-	-	-	-
15.Pelayang	-	-	12	39	-
16.Jujuhan	-	108	-	-	-
17.Jujuhan Ilir	36	-	11	28	-
Jumlah	1.259	1.570	814	781	119

Sumber: 2017-2021,TPH-BUN

2.3. SARANA DAN PRASARANA EKONOMI

Rasio jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga adalah perbandingan antara jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan (pasar, minimarket, toko, warung, restoran, dll) dengan jumlah rumah tangga di desa. Sarana dan prasarana penyedia pangan diasumsikan sebagai tempat penyimpanan pangan (stok pangan) yang diperoleh dari petani sebagai produsen pangan maupun dari luar wilayah, yang selanjutnya disediakan bagi masyarakat untuk konsumsi. Oleh karena itu, semakin tinggi rasio sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga di desa maka diasumsikan semakin baik tingkat ketersediaan pangan di desa tersebut.

Dari 153 desa di Kabupaten Bungo,43 desa masuk dalam prioritas 1 (15,03 %), 24 desa prioritas 2 (15,68 %) dan 15 desa prioritas 3 (20,26 %).



Tabel 2.8 Sebaran rasio sarana prasarana ekonomi berdasarkan prioritas

No.	Prioritas	Rasio Sarana Ekonomi	Jumlah Desa	Persentase
1	1	≤ 0.0233	43	9,15
2	2	$> 0.0233 - 0.0362$	24	15,68
3	3	$> 0.0362 - 0.0467$	15	22,26
4	4	$> 0.0467 - 0.0600$	7	4,57
5	5	$> 0.0600 - 0.0781$	18	11,76
6	6	> 0.0781	46	30,06

2.4. Strategi Pemenuhan Ketersediaan Pangan

Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Bungo dari tahun 2017-2021 mencapai 1.3 % per tahun sementara pertumbuhan produksi padi dan jagung mencapai 1,7% dan 0 %. Rata-rata kepemilikan lahan petani di Kabupaten Bungo adalah sebesar 2,4 ha. Rasio lahan pertanian dibandingkan lahan total adalah sebesar 0,011. Sementara itu laju konversi lahan sebesar 1%. Rasio sarana ekonomi penyedia pangan pada prioritas 1-3 mencapai 0,0233-0.0467. Hal tersebut menjadi tantangan dalam pemenuhan ketersediaan pangan.

Strategi untuk Meningkatkan Ketersediaan Pangan.

Kebijakan kabupaten mengenai ketersediaan pangan pada periode 2017.-2021. bertujuan untuk (i) meningkatkan produktivitas; (ii) perluasan lahan sawah; (iii) mengurangi dampak iklim-terkait resiko; (iv) memperkuat kelembagaan bagi petani, Cadangan Pangan. Strategi untuk masing-masing tujuan adalah sebagai berikut:

(i) Peningkatan produktivitas

- a. Pendirian Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman dan Sumber Daya Terpadu (SLPTT)

- b. Perbaiki penggunaan varietas tanaman
 - c. Pemupukan berimbang, baik pupuk organik maupun bio hayati
 - d. Pengelolaan air
 - e. Memperkuat pengawasan, koordinasi dan supervisi untuk peningkatan produktivitas pertanian
- (ii) Perluasan lahan sawah
- a. Pengembangan lahan sawah
 - b. Optimalisasi penggunaan lahan
 - c. Pengembangan dan rehabilitasi Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) dan Jaringan Irigasi Desa (JIDES)
 - d. Pembangunan sumur pompa dan dam/embung
- (iii) Pengurangan dampak iklim terkait resiko
- a. Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)
 - b. Mengurangi kehilangan hasil (susut) pada saat panen dan pengolahan hasil panen
- (iv) Penguatan kelembagaan bagi petani
- a. Kredit dan energi untuk ketahanan pangan
 - b. Lembaga Mandiri dan Mengakar pada Masyarakat
 - c. Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat
 - d. Pemasaran produk pertanian, misal TTI, dll.
- (v) Cadangan Pangan Daerah (CPD)
- a. Pengadaan Cadangan Pangan (CPD)
 - b. Mengembangkan Cadangan Pangan Desa
 - c. Pembinaan pada Lumbung Pangan masyarakat

BAB 3

AKSES TERHADAP PANGAN

Keterjangkauan pangan atau akses terhadap pangan adalah kemampuan rumah tangga untuk memperoleh cukup pangan, baik yang berasal dari produksi sendiri, stok, pembelian, barter, hadiah, pinjaman dan bantuan pangan. Pangan mungkin tersedia di suatu wilayah tetapi tidak dapat diakses oleh rumah tangga tertentu karena terbatasnya: (1) **Akses ekonomi**: kemampuan keuangan untuk membeli pangan yang cukup dan bergizi; (2) **Akses fisik**: keberadaan infrastruktur untuk mencapai sumber pangan; dan/atau (3) **Akses sosial**: modal sosial yang dapat digunakan untuk mendapatkan dukungan informal dalam mengakses pangan, seperti barter, pinjaman atau program jaring pengaman sosial. Dalam penyusunan FSVA Kabupaten, indikator yang digunakan dalam aspek keterjangkauan pangan hanya mewakili akses ekonomi dan fisik saja, yaitu: (1) Rasio jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk desa; dan (2) Desa yang tidak memiliki akses penghubung memadai melalui darat, air atau udara.

3.1 PENDUDUK DENGAN TINGKAT KESEJAHTERAAN TERENDAH

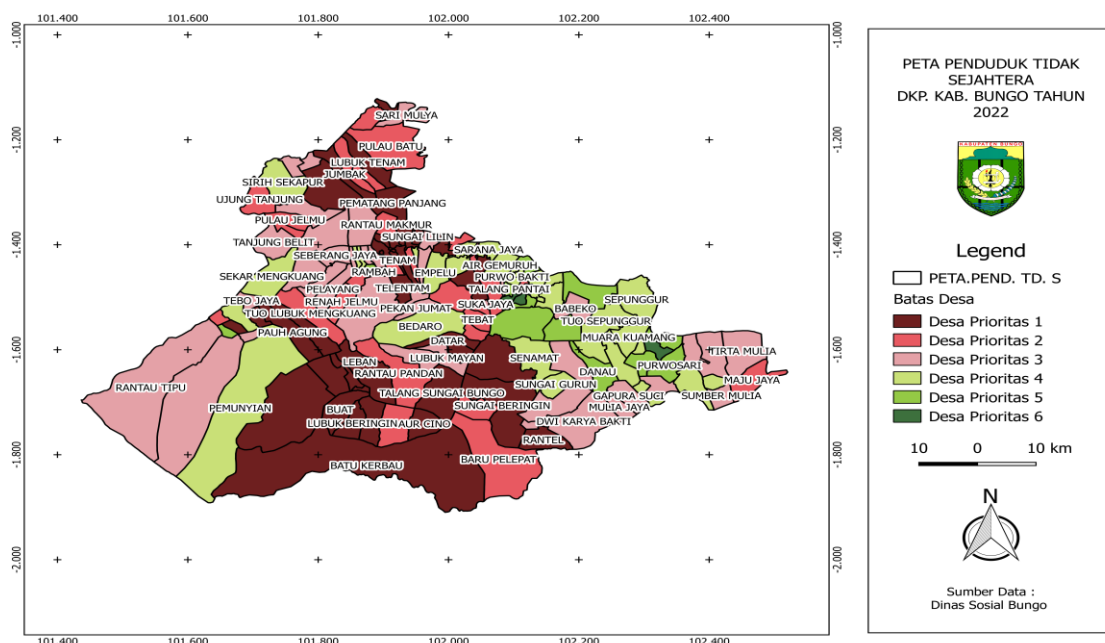
Berbagai program penanggulangan kemiskinan sudah dijalankan oleh pemerintah termasuk pemerintah Kabupaten Bungo. Rasio kemiskinan telah berkurang dalam beberapa tahun terakhir, jumlah penduduk miskin Kabupaten Bungo terus mengalami kenaikan dari 5,56.% (20.334 jiwa) tahun 2019 menjadi 24,17 .% (85.159 jiwa) tahun 2020 dan 33,3% (120.169 Jiwa) tahun 2021 .

Tabel 3.1 Persentase Populasi di Bawah Garis Kemiskinan Kabupaten Bungo

Keterangan	2017	2018	2019	2020	2021
Persentase penduduk miskin	5,55	5,63	5,56	24,17	33,3

Sumber: Dinas Sosial 2021

Pada tingkat desa berdasarkan data Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin tahun 2021, terdapat 39 desa yang memiliki rasio rumah tangga dengan dengan tingkat kesejahteraan terendah diatas (Prioritas 1) 25,49%. Sebanyak 26 desa (16,99%) masuk prioritas 2, dan 39 desa (25,49%) masuk Prioritas 3. Oleh karena itu, program-program penanggulangan kemiskinan Kabupaten ke depan masih harus ditingkatkan dan diprioritaskan di 49 desa tersebut.



Tabel 3.2 Sebaran desa dengan tingkat kesejahteraan terendah berdasarkan skala prioritas

Prioritas	Range	Jumlah Desa	Persentase
1	≥ 0.5271	39	25,49
2	$0.4354 - < 0.5271$	26	16,99
3	$0.3015 - < 0.4354$	39	25,49
4	$0.1962 - < 0.3015$	29	18,95
5	$0.1555 - < 0.1962$	15	9,80
6	< 0.1555	5	2,26

3.2 AKSES TRANSPORTASI

Kurangnya akses terhadap infrastruktur menyebabkan kemiskinan, dimana masyarakat yang tinggal di daerah terisolir atau terpencil dengan kondisi geografis yang sulit dan ketersediaan pasar yang buruk kurang memiliki kesempatan ekonomi dan pelayanan jasa yang memadai. Dengan kata lain, kelompok miskin ini masih kurang mendapatkan akses terhadap program pembangunan pemerintah. Investasi pada infrastruktur, khususnya infrastruktur transportasi (jalan, pelabuhan, bandara dan lain-lain), listrik, infrastruktur pertanian (irigasi), fasilitas pendidikan dan kesehatan dapat sepenuhnya mengubah suatu wilayah sehingga menciptakan landasan pertumbuhan ekonomi dan partisipasi yang lebih besar dari masyarakat yang tinggal di daerah terpencil.

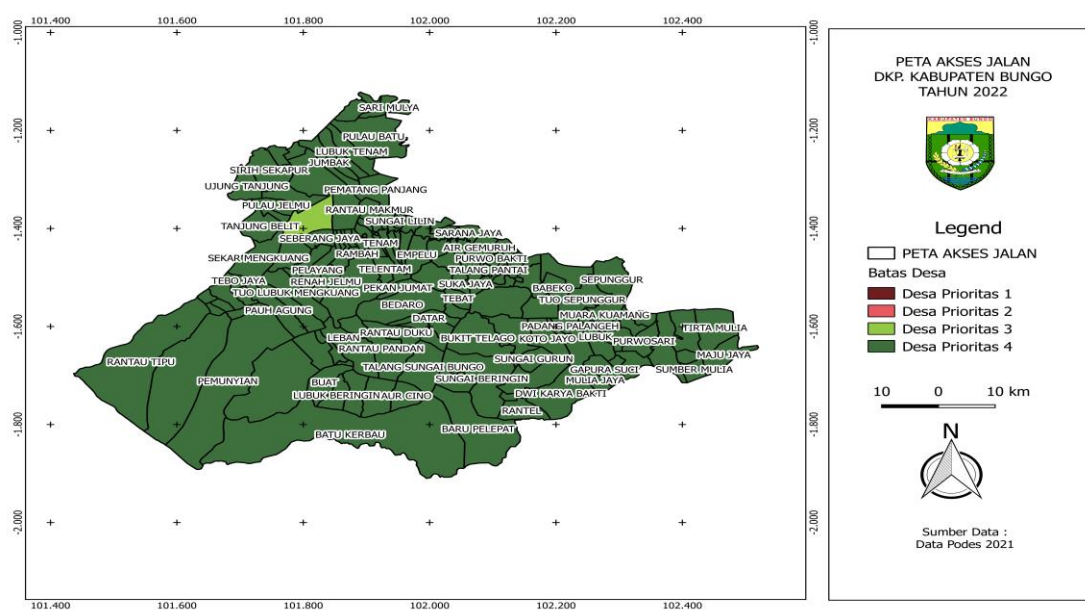
Pada sektor pertanian, faktor yang menyebabkan tingkat pendapatan yang rendah adalah rendahnya harga komoditas pertanian di tingkat petani/produsen (*farm gate price*) di daerah perdesaan dibandingkan dengan harga di perkotaan untuk komoditas dengan kualitas sama (komoditas belum diubah atau diproses). Rendahnya harga komoditas pertanian ditingkat petani merupakan akibat dari tingginya biaya transportasi untuk

pemasaran hasil pertanian dari desa surplus. Biaya transportasi akan lebih tinggi pada kendaraan bermotor-melewati jalan setapak dan jalan kecil dengan tenaga manusia atau hewan, misalnya pada daerah yang tidak memiliki akses jalan yang memadai. Dalam sebuah kajian cepat mengenai penyebab kemiskinan pada desa terpencil diketahui bahwa biaya transportasi merupakan salah satu penyebab terjadinya kemiskinan tersebut. Tingginya harga komoditas pertanian di tingkat petani akan meningkatkan pendapatan yang diterima oleh masyarakat petani. Walaupun demikian, peningkatan pendapatan saja tanpa dibarengi dengan perbaikan akses terhadap pelayanan jasa dan infrastruktur belum cukup untuk menjamin kesejahteraan masyarakat petani namun di Kabupaten Bungo Jalan tidak lagi merupakan penyebab tersebut.

Keterbelakangan infrastruktur menghalangi laju perkembangan suatu wilayah. Infrastruktur yang lebih baik akan menarik investasi yang lebih besar pada berbagai sektor, yang pada akhirnya dapat menjadi daya dorong bagi penghidupan yang berkelanjutan.

Berdasarkan data PODES (Potensi Desa) 2021, BPS, di Kabupaten Bungo, hampir semua desa memiliki akses penghubung bagi kendaraan roda 4 sepanjang tahun. Desa yang bisa dilalui kendaraan roda 4 sepanjang tahun kecuali saat tertentu (ketika turun hujan, longsor, pasang, dll) terdapat di Kecamatan Pelayang (Desa Talang selungko).

Jalan merupakan modal transportasi utama di Kabupaten Bungo, Data yang akurat untuk modal transportasi air tidak tersedia, jenis transportasi ini tidak dimasukkan sebagai salah satu indikator akses infrastruktur.



3.3 Strategi Peningkatan Akses Pangan

Strategi Pengurangan Kemiskinan, Peningkatan Akses terhadap Pangan (Menyesuaikan dengan RPJP/RPJM atau Rencana Pembangunan yang ada di Kabupaten yang berkaitan dengan aspek akses pangan)

Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo untuk menanggulangi kemiskinan seperti yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Bungo tahun 2021 diantaranya:

- Mempercepat pemenuhan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat miskin
- Mendorong tumbuh dan berkembangnya lembaga keuangan mikro dan sarana pendukung perekonomian sampai tingkat perdesaan
- Mendorong tumbuh dan berkembangnya pusat-pusat agrobisnis dan agroindustri
- Mendorong pemerataan pembangunan infrastruktur antara desa-kota, daerah terisolir

BAB 4

PEMANFAATAN PANGAN

Aspek ketiga dari konsep ketahanan pangan adalah pemanfaatan pangan. Pemanfaatan pangan meliputi: (1) Pemanfaatan pangan yang bisa di akses oleh rumah tangga; dan (2) Kemampuan individu untuk menyerap zat gizi secara efisien oleh tubuh. Pemanfaatan pangan juga meliputi cara penyimpanan, pengolahan, dan penyajian makanan termasuk penggunaan air selama proses pengolahannya serta kondisi budaya atau kebiasaan dalam pemberian makanan terutama kepada individu yang memerlukan jenis pangan khusus sesuai dengan kebutuhan masing-masing individu (saat masa pertumbuhan, kehamilan, menyusui, dll) atau status kesehatan masing-masing individu. Dalam penyusunan FSVA Kabupaten, aspek pemanfaatan pangan meliputi indikator sebagai berikut: (1) Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga; dan (2) Rasio jumlah penduduk desa per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk.

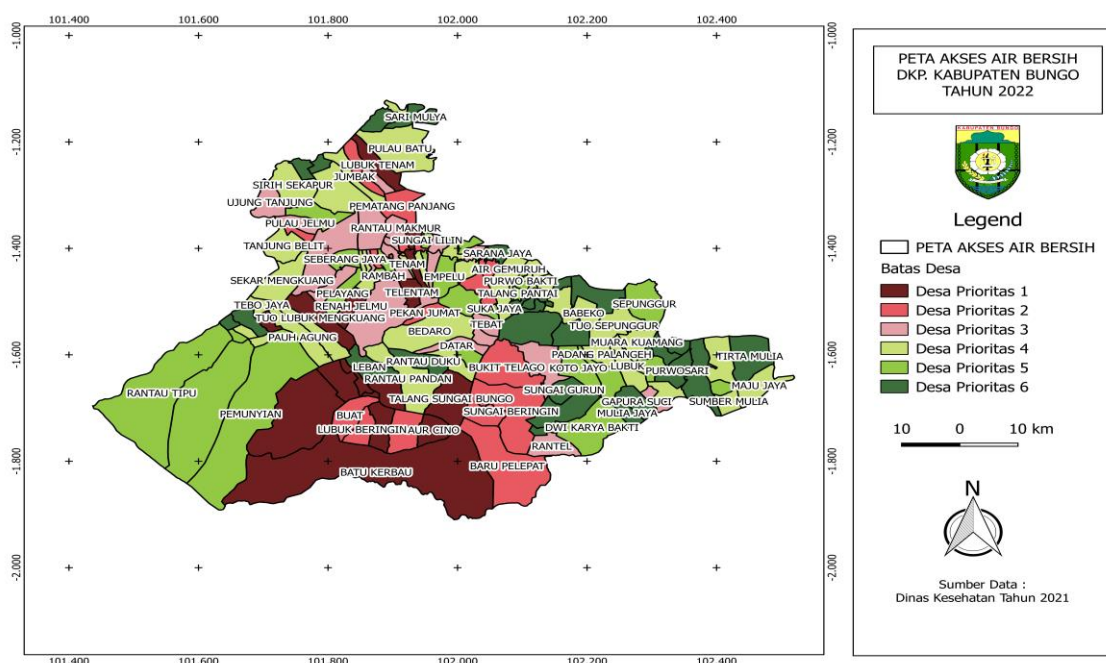
4.1 AKSES TERHADAP AKSES AIR BERSIH

Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga merupakan perbandingan antara jumlah rumah tangga Desil 1-4 dengan sumber air bersih tidak terlindung dengan jumlah rumah tangga di desa. Air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak⁴. Sumber air bersih yang tidak terlindungi berpotensi meningkatkan angka kesakitan serta menurunkan kemampuan dalam menyerap makanan yang pada akhirnya akan mempengaruhi status gizi individu.

Dari jumlah 153 Desa di Kabupaten Bungo 16 menjadi prioritas 1 (10,45 %), 18 desa prioritas 2 (12,41 %) dan 23 desa prioritas 3 (15.03 %) seperti Tabel : 4.1

Tabel 4.1 Sebaran desa berdasarkan rumah tangga tanpa akses air bersih berdasarkan skala prioritas

Prioritas	Range	Jumlah Desa	Persentase
1	≥ 0.2920	16	10,45
2	$0.1839 - < 0.2920$	19	12,41
3	$0.1093 - < 0.1839$	23	15.03
4	$0.0557 - < 0.1093$	38	24,83
5	$0.0200 - < 0.0557$	23	15,03
6	< 0.0200	34	22,22



4.2 RASIO TENAGA KESEHATAN

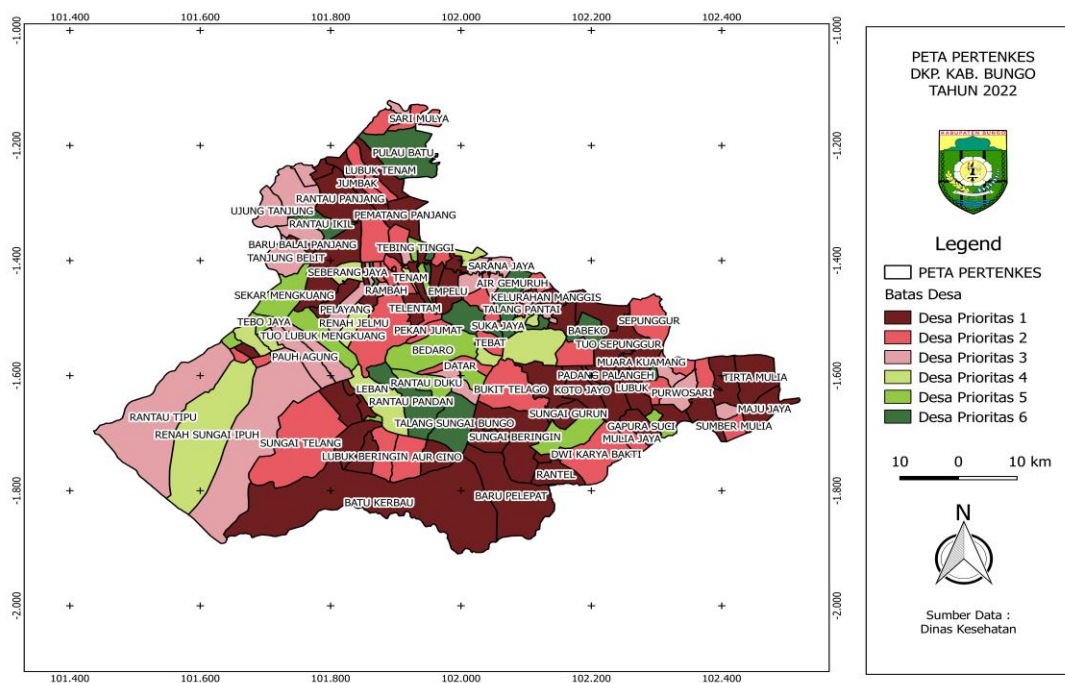
Rasio jumlah penduduk desa per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk adalah jumlah penduduk desa per tenaga kesehatan yang terdiri dari: (1) Dokter umum/spesialis; (2) Dokter gigi; (3) Bidan; dan (4) Tenaga kesehatan lainnya (perawat, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga gizi, apoteker/asisten apoteker) dibandingkan dengan kepadatan penduduk. Tenaga kesehatan berperan penting dalam menurunkan angka kesakitan penduduk (morbiditas) dan meningkatkan pengetahuan masyarakat akan pentingnya makanan yang beragam bergizi seimbang dan aman.

Rasio jumlah penduduk desa per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk menunjukkan kemampuan jumlah tenaga kesehatan yang ada di wilayah desa untuk melayani masyarakat. Jumlah tenaga kesehatan yang memadai akan meningkatkan status pemanfaatan pangan masyarakat.

Dari jumlah 153 Desa di Kabupaten Bungo 48 menjadi prioritas 1 (31,37 %), 35 desa prioritas 2 (22,87 %) dan 30 desa prioritas 3 (19.60%) seperti Tabel : 4.2

Tabel 4.2 Sebaran rasio tenaga kesehatan di desa berdasarkan skala prioritas

Prioritas	Range	Jumlah Desa	Persentase
1	≥ 16.6980	48	31,37
2	6.6010 - < 16.6980	35	22,87
3	2.9270 - < 6.6010	30	19,60
4	1.3710 - < 2.9270	13	8,49
5	0.5210 - < 1.3710	13	8,49
6	< 0.5210	14	9,15



4.3 DAMPAK (OUTCOME) DARI STATUS KESEHATAN

Ketahanan pangan merupakan salah satu aspek yang mempengaruhi status kesehatan dan gizi masyarakat. Status gizi anak ditentukan oleh asupan makanan dan penyakit yang dideritanya. Status gizi anak balita diukur dengan 3 indikator yaitu:

1. Berat Badan Kurang dan Berat Badan Sangat Kurang yang biasa dikenal dengan *underweight* (berat badan berdasarkan umur (BB/U) dengan Zscore dari -2 dari median menurut referensi WHO 2005, yang mengacu kepada gabungan dari kurang gizi akut dan kronis);
2. Pendek atau *stunting* (tinggi badan berdasarkan umur (TB/U) dengan Zscore kurang dari -2 dari median menurut referensi WHO 2005, yang mengacu ke kurang gizi kronis jangka panjang); dan
3. Kurus atau *wasting* (berat badan berdasarkan tinggi badan (BB/TB) dengan Zscore kurang dari -2 dari median menurut referensi WHO 2005, yang mengacu kepada kurang gizi akut atau baru saja mengalami kekurangan gizi).

Jumlah penderita gizi buruk di Kabupaten Bungo pada tahun 2017-2021 sebanyak 0 balita.

Tabel 4.2 Penderita Gizi Buruk 2017-2021

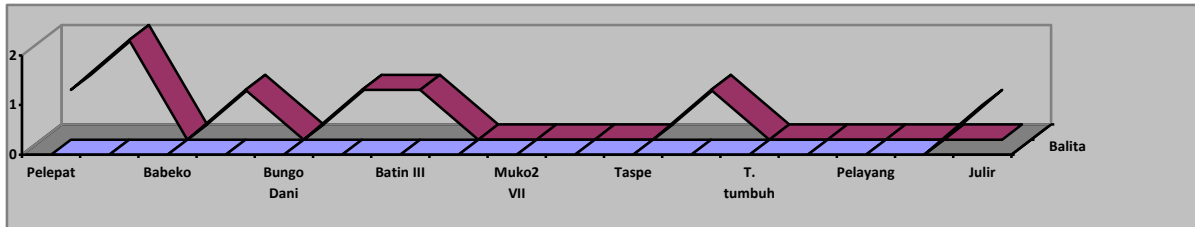
No.	Kecamatan	Penderita Gizi Buruk				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Pelepat	-	-	-	-	-
2	Pelepat Ilir	-	-	-	-	-
3	Bathin II Babeko	-	-	-	-	-
4	Rimbo Tengah	-	-	-	-	-
5	Bungo Dani	-	-	-	-	-

6	Pasar Muara Bungo	-	-	-	-	-
7	Bathin III	-	-	-	-	-
8	Rantau Pandan	-	-	-	-	-
9	Muko-muko Bathin IV	-	-	-	-	-
10	Bathin III Ulu	-	-	-	-	-
11	Tanah Sepenggal	-	-	-	-	-
12	Tanah Sepenggal Lintas	-	-	-	-	-
13	Tanah Tumbuh	-	-	-	-	-
14	Limbur Lubuk Mengkuang	-	-	-	-	-
15	Pelayang	-	-	-	-	-
16	Jujuhan	-	-	-	-	-
17	Jujuhan Ilir	-	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-	-

Angka kematian balita dan ibu saat melahirkan merupakan dampak dari status kesehatan dan gizi. Angka kematian balita di Kabupaten Bungo tahun 2021 adalah 1 jiwa. Sementara angka kematian ibu saat melahirkan di Kabupaten Bungo 7 jiwa. Angka kematian balita tertinggi terdapat di Kecamatan Jujuhan Ilir (1jiwa) dan terendah terdapat di Kecamatan (0jiwa). Angka kematian ibu saat melahirkan tertinggi di 16 Kecamatan Pelepat ilir (2 jiwa) dan terendah di 11 Kecamatan (0 jiwa). Untuk lebih lengkap dapat dilihat pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3 Jumlah Kematian Balita dan Ibu Saat Melahirkan per Kecamatan

No.	Kecamatan	Jumlah Kematian Balita	Jumlah Kematian Ibu Saat Melahirkan	Total
1	Pelepat	-	1	1
2	Pelepat Ilir	-	2	2
3	Bathin II Babeko	-	-	-
4	Rimbo Tengah	-	1	1
5	Bungo Dani	-	-	-
6	Pasar Muara Bungo	-	1	1
7	Bathin III	-	1	1
8	Rantau Pandan	-	-	-
9	Muko-muko Bathin IV	-	-	-
10	Bathin III Ulu	-	-	-
11	Tanah Sepenggal	-	-	-
12	Tanah Sepenggal Lintas	-	1	1
13	Tanah Tumbuh	-	-	-
14	Limbur Lubuk Mengkuang	-	-	-
15	Pelayang	-	-	-
16	Jujuhan	-	-	-
17	Jujuhan Ilir	1	-	1



Gambar 4.3 Grafik Jumlah Kematian Balita dan Ibu Saat Melahirkan per Kecamatan

4.4. Strategi Peningkatan Pemanfaatan Pangan

Strategi Untuk Memperbaiki Status Gizi dan Kesehatan Kelompok Rentan (Menyesuaikan dengan RPJP/RPJM atau Rencana Pembangunan yang ada di Kabupaten yang berkaitan dengan aspek ketersediaan pangan)

Masalah gizi kronis (stunting) masih tetap tinggi di Kabupaten Bungo, masalah gizi kronis merupakan akibat kurang optimalnya pertumbuhan janin dan bayi di usia dua tahun pertama kehidupannya, terutama gabungan dari kurangnya asupan gizi, paparan terhadap penyakit yang tinggi serta pola pengasuhan yang kurang tepat. Semua faktor ini dapat menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki, yang akhirnya dapat menyebabkan meningkatnya beban penyakit dan kematian pada balita.

Kurang gizi pada usia dini, terutama stunting dapat menghambat perkembangan fisik dan mental yang akhirnya mempengaruhi prestasi dan tingkat kehadiran di sekolah. Anak yang kurang gizi lebih cenderung untuk masuk sekolah lebih lambat dan lebih cepat putus sekolah. Dampak ke masa depannya adalah mempengaruhi potensi kemampuan mencari nafkah, sehingga sulit keluar dari lingkaran kemiskinan. Anak yang menderita kurang berat badan menurut umur (kurang gizi) dan secara cepat berat badannya meningkat, maka pada saat dewasa cenderung untuk menderita penyakit kronik yang terkait gizi (kencing manis, tekanan darah tinggi dan penyakit jantung koroner). Dampak jangka panjang, oleh kurang gizi pada masa anak-anak juga menyebabkan rendahnya tinggi badan dan pada ibu-ibu dapat melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR), yang akhirnya menyebabkan terulangnya lingkaran masalah ini pada generasi selanjutnya.

Untuk menurunkan prevalensi stunting, maka intervensi gizi harus segera direncanakan dan dilakukan secara efektif pada semua tingkatan, mulai dari rumah tangga sampai tingkat nasional. Untuk mencegah dan mengatasi masalah kekurangan gizi secara efektif, perlu prioritas untuk kelompokrentan gizi, memahami penyebab kurang gizi adalah multidimensi, intervensi yang tepat dan efektif untuk mengatasinya, dan meningkatkan komitmen serta investasi dalam bidang gizi. Berikut ini adalah rekomendasi untuk mengatasi masalah gizi:

1. Fokus pada kelompok rentan gizi, termasuk:
 - a. Anak usia di bawah dua tahun. Usia dua tahun pertama di dalam kehidupan adalah usia yang paling kritis sehingga disebut "jendela peluang (*window of opportunity*)" karena mencegah kurang gizi pada usia ini akan sangat berarti untuk kelompok ini

pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Meskipun kerusakan sudah terjadi dan seharusnya dihindari sejak dari usia 9 bulan sampai usia 24 bulan, kerentanan anak terhadap penyakit dan resiko kematian masih tinggi di usia lima tahun pertama. Itulah sebabnya banyak intervensi kesehatan dan gizi yang difokuskan pada anak di bawah lima tahun. Intervensi kesehatan dan gizi harus difokuskan pada anak di bawah dua tahun, akan tetapi apabila anggaran memadai maka perlu dilakukan juga untuk anak di bawah lima tahun.

- b. Anak-anak kurang gizi ringan. Kelompok ini memiliki resiko lebih tinggi untuk meninggal karena meningkatnya kerentanan terhadap infeksi. Anak yang terdeteksi kurang gizi seharusnya di rawat dengan tepat untuk mencegah mereka menjadi gizi buruk.
 - c. Ibu hamil dan menyusui, karena kelompok ini memerlukan kecukupan gizi bagi pertumbuhan dan perkembangan janin, dan untuk menghasilkan ASI (Air Susu Ibu) untuk bayi mereka.
 - d. Kurang gizi mikro untuk semua kelompok umur, terutama pada anak-anak, ibu hamil dan menyusui. Kekurangan gizi mikro pada semua kelompok umur cukup tinggi disebabkan karena asupan karbohidrat yang tinggi, rendahnya asupan protein (hewani) sayur dan buah serta makanan yang berfortifikasi. Pada kondisi ini biasanya prevalensi stunting pada balita juga cukup tinggi.
2. Perencanaan dan penerapan intervensi multi-sektoral untuk mengatasi TIGA penyebab dasar kekurangan gizi (pangan, kesehatan dan pengasuhan).
- Satu sektor saja (sektor kesehatan atau pendidikan atau pertanian) tidak dapat mengatasi masalah gizi secara efektif karena masalah tersebut adalah multi sektor.
- a. Intervensi langsung dengan manfaat langsung terhadap gizi (terutama melalui Sektor Kesehatan):
 - Memperbaiki gizi dan pelayanan ibu hamil, terutama selama 2 trimester pertama usia kehamilan: makan lebih sering, beraneka ragam, dan bergizi; minum pil besi atau menggunakan suplemen gizi mikro tabor (Sprinkle) setiap hari; memeriksakan kehamilan sekurangnya 4 kali selama periode kehamilan.
 - Promosi menyusui ASI selama 0-24 bulan: inisial menyusui dini segera sesudah bayi lahir; menyusui ASI eksklusif sampai 6 bulan pertama, melanjutkan pemberian ASI sampai 24 bulan; melanjutkan menyusui walaupun anak sakit.
 - Meningkatkan pola pemberian makanan tambahan untuk anak usia 6-24 bulan; mulai pemberian makanan tambahan sejak anak berusia 7 bulan; pemberian makanan lebih sering, jumlah sedikit, beraneka ragam dan bergizi (pangan hewani, telur, kacang-kacangan, polong-polongan, kacang tanah, sayur, buah dan minyak); hindari pemberian jajan yang tidak sehat.
 - Pemantauan berat dan tinggi badan bayi 0-24 bulan atau jika sumber daya memungkinkan, untuk anak 0-59 bulan secara teratur, untuk mendeteksi kurang

gizi secara dini sehingga bias dilakukan intervensi sedini mungkin. Meningkatkan komunikasi mengenai berat badan anak, cara mencegah dan memperbaiki kegagalan berat dan tinggi anak dengan keluarga.

- Mengatasi masalah kurang gizi akut pada balita dengan menyediakan fasilitas fasilitas dan manajemen berbasis masyarakat berdasarkan pedoman dari WHO/UNICEF dan Departemen Kesehatan.
 - Memperbaiki asupan gizi mikro: promosi garam beryodium; penganekaragaman asupan makanan; fortifikasi makanan; pemberian bil besi untuk ibu hamil; pemberian vitamin A setiap 6 bulan sekali untuk anak 6-24 bulan (atau anak 6-59 bulan jika alokasi anggaran mencukupi), serta ibu menyusui dalam jangka waktu 1 bulan setelah melahirkan atau masa nifas; pemberian obat cacing.
- b. Intervensi tidak langsung dengan manfaat tidak langsung terhadap gizi (terutama melalui sektor di luar kesehatan)
3. Prioritas dan peningkatan investasi serta komitmen dalam hal gizi untuk mengatasi masalah gizi.

Dampak ekonomi akibat kekurangan gizi pada anak-anak adalah sangat tinggi. Kekurangan gizi pada anak akan menyebabkan hilangnya produktivitas pada masa dewasa, dan tingginya biaya pelayanan kesehatan dan pendidikan. Ada beberapa macam bentuk dari malnutrisi pada masa anak-anak yang dapat menyebabkan hilangnya produktivitas mereka pada masa dewasa yang berkaitan dengan rendahnya kemampuan kognitif. Kekurangan energi-protein berkontribusi sebesar 10% dari hilangnya produktivitas pada masa dewasa, kekurangan zat besi (anemia) berkontribusi sebesar 4% dan kekurangan zat yodium sebesar 10%. Malnutrisi pada masa anak-anak juga berpotensi menyebabkan hilangnya produktivitas tenaga kerja kasar.

Investasi di bidang gizi merupakan salah satu jenis intervensi pembangunan yang paling efektif dari segi biaya, karena memiliki rasio manfaat-biaya yang tinggi, bukan hanya untuk individu, tetapi juga pembangunan negara yang berkelanjutan, sebab intervensi ini dapat melindungi kesehatan, mencegah kecacatan dan dapat memacu produktivitas ekonomi dan menjaga kelangsungan hidup.

BAB 5

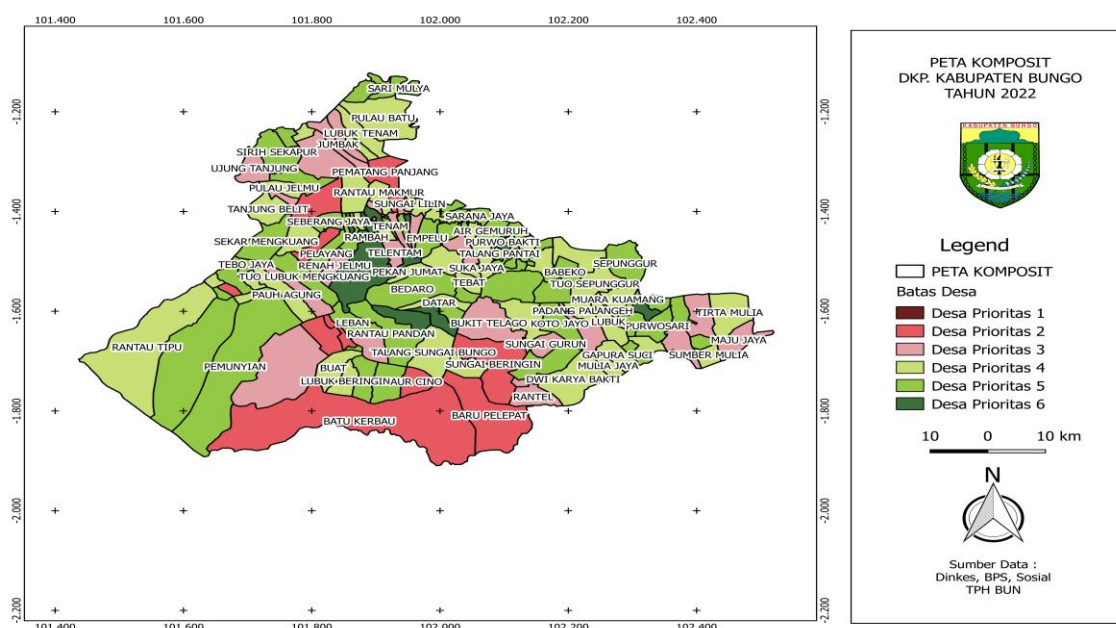
KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN KOMPOSIT

Sebagaimana disebutkan di dalam Bab 1, bahwa kondisi kerentanan terhadap kerawanan pangan kronis secara komposit ditentukan berdasarkan 6 indikator yang berhubungan dengan ketersediaan pangan, akses pangan dan penghidupan, serta pemanfaatan pangan dan gizi, yang dijelaskan secara rinci pada Bab Dua, Tiga dan Empat. Peta kerentanan terhadap kerawanan pangan komposit (Peta 6.1) ditetapkan melalui Analisis Pembobotan.

5.1. KONDISI KETAHANAN PANGAN

Peta komposit menjelaskan kondisi kerentanan terhadap kerawanan pangan suatu wilayah (kecamatan) yang disebabkan oleh kombinasi dari berbagai dimensi kerawanan pangan. Berdasarkan hasil pembobotan, desa-desa dikelompokkan ke dalam 6 prioritas. Prioritas 1 merupakan prioritas utama yang menggambarkan tingkat kerentanan yang paling tinggi, sedangkan prioritas 6 merupakan prioritas yang relatif lebih tahan pangan. Dengan kata lain, wilayah (desa) prioritas 1 memiliki tingkat resiko kerentanan terhadap kerawanan pangan yang lebih besar dibandingkan wilayah (desa) lainnya sehingga memerlukan perhatian segera. Meskipun demikian, wilayah (desa) yang berada pada prioritas 1 tidak berarti semua penduduknya berada dalam kondisi rawan pangan, juga sebaliknya wilayah (desa) pada prioritas 6 tidak berarti semua penduduknya tahan pangan.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, dari 153 desa yang ada di Kabupaten Bungo maka didapatkan 0 desa (Prioritas 1), 11 desa (Prioritas 2), 24 desa (Prioritas 3), 47 desa (Prioritas 4), 59 desa (Prioritas 5) dan 12 desa (Prioritas 6).



INDEKS KOMPOSIT			
PRIORITAS KOMPOSIT	CUT OFF INDEKS KOMPOSIT		
Prioritas 1		<=	37.92
Prioritas 2	> 37.92	-	47.55
Prioritas 3	> 47.55	-	53.63
Prioritas 4	> 53.63	-	60.21
Prioritas 5	> 60.21	-	65.90
Prioritas 6	>		65.90

Tabel 5.1. Sebaran Jumlah Desa berdasarkan Prioritas

Prioritas	Jumlah Desa	Persentase
1	0	0
2	11	7,18
3	24	15,68
4	47	30,71
5	59	38,56
6	12	7,84

Desa rentan terhadap kerawanan pangan prioritas 2 terdapat di wilayah Kecamatan Pelepat (11 desa), Kecamatan. Batin III Ulu (3 desa), Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang (1 desa), Kecamatan Pelepat (3 Desa), Kecamatan Pelayang (2 Desa) dan Kecamatan Tanah Sepenggall Lintas (2 Desa)

No.	Nama Kec	Nama Desa	PRIO KOMP
1	BATHIN II PELAYANG	Talang Silungko	2
2	BATHIN II PELAYANG	Paninjau	2
3	BATHIN III ULU	Karak Apung	2
4	BATHIN III ULU	Aur Cino	2
5	BATHIN III ULU	Timbolasi	2
6	LIMBUR LUBUK MENGGUANG	Tanjung Bungo	2
7	PELEPAT	Batu Kerbau	2
8	PELEPAT	Sei Beringin	2
9	PELEPAT	Baru Pelepat	2
10	TANAH SEPENGGAL LINTAS	Pematang Panjang	2
11	TANAH SEPENGGAL LINTAS	Tebing Tinggi	2

Desa rentan terhadap kerawanan pangan prioritas 3 terdapat di wilayah Kecamatan Pelepat. (4 desa), Kecamatan Rantau Pandan (1 desa), Kecamatan Bathin III Ulu(1 desa), Kecamatan Tanah Sepenggall Lintas (2 desa), dan Kecamatan Limbur LB mengkuang (1 Desa),Kec. Jujuhan (4 Desa),Kec.Jujuhan Ilir (1 Desa), Kec.Muko-Muko Batin VII (1 Desa), Kecd. Pelepat Ilir (4 Desa) ,Kec.Tanah Sepenggall (4 Desa) dan Kec. Tanah Tumbuh (1 Desa).

No.	Nama Kec	Nama Desa	PRIO KOMP
1	Bathin III Ulu	Sei Telang	3
2	Jujuhan	Baru Balai Panjang	3
3	Jujuhan	Jumbak	3
4	Jujuhan	Rantau Panjang	3
5	Jujuhan	Ujung Tanjung	3
6	Jujuhan Ilir	Tepian Danto	3
7	Limbur Lubuk Mengkuang	Baru Lubuk Mengkuang	3
8	Muko-Muko Bhatin VII	Mangun Jayo	3
9	Pelepat	Rantel	3
10	Pelepat	Balai Jaya	3
11	Pelepat	Sungai Gurun	3
12	Pelepat	Bukit Telago	3
13	Pelepat Ilir	Maju Jaya	3
14	Pelepat Ilir	Lingga Kuamang	3
15	Pelepat Ilir	Danau	3
16	Pelepat Ilir	Lembah Kuamang	3
17	Rantau Pandan	Lubuk Kayu Aro	3
18	Tanah Sepenggal	Pasar Rantau Embacan g	3
19	Tanah Sepenggal	Telentam	3
20	Tanah Sepenggal	Tanah Bekali	3
21	Tanah Sepenggal	Tanjung	3
22	Tanah Sepenggal Lintas	Lubuk Landai	3
23	Tanah Sepenggal Lintas	Paku Aji	3
24	Tanah Tumbuh	Renah Jelmu	3

5.2. FAKTOR PENYEBAB KERENTANAN PANGAN

1. Desa rentan terhadap kerawanan pangan Prioritas 1 tidak ada
2. Desa rentan terhadap kerawanan pangan Prioritas 2 secara umum disebabkan oleh:
 - (1) Kesejahteraan, (2) Air Bersih, dan (3) Tenaga kesehatan.

Nama Kec	Nama Desa	1. P.Lahan	2. P.Sarana	3. P.Tdk Sejah	4. P.Jalan	5. P.NoWater	6. P.Tenkes	INDEKS KOM
PELEPAT	BATU KERBAU	6	4	1	4	1	1	46,58
PELEPAT	BARU PELEPAT	1	2	2	4	2	1	45,36
PELEPAT	Sei Beringin	4	2	1	4	2	1	40,58
BATHIN III ULU	TIMBOLASI	6	6	1	4	1	1	46,28
BATHIN III ULU	KARAK APUNG	6	1	1	4	1	1	41,55
BATHIN III ULU	AUR CINO	1	6	1	4	1	1	41,70
TANAH SEP Lintas	Pematang Panjang	1	1	1	4	2	1	44,69

TANAH SEP Lintas	TEBING TINGGI	1	6	1	4	1	5	46,18
LIMBUR LUBUK M	TANJUNG BUNGO	1	6	1	4	4	1	46,24
BATHIN II PELAYANG	PENINJAU	5	1	3	4	3	1	44,84
BATHIN II PELAYANG	TALANG SILUNGKO	1	1	3	3	3	1	42,51

3. Desa rentan terhadap kerawanan pangan Prioritas 3 secara umum disebabkan oleh:
(1) Air Bersih, (2) Tenaga Kesehatan, (3) Kesejahteraan dan (4) Lahan pertanian

Nama Kec	Nama Desa	1. P.Lahan	2. P.Sarana	3. P.Tdk Sejah	4. P.Jalan	5. P.NoWATER	6. P.Tenkes	INDEKS KOM
PELEPAT	RANTEL	4	5	1	4	3	1	48,48
PELEPAT	BALAI JAYA	4	3	3	4	6	1	50,50
PELEPAT	SUNGAI GURUN	4	6	4	4	6	1	51,01
PELEPAT	BUKIT TELAGO	4	6	1	4	2	2	53,59
PELEPAT ILIR	LEMBAH KUAMANG	1	2	4	4	6	1	52,23
PELEPAT ILIR	MAJU JAYA	1	1	2	4	4	1	48,25
PELEPAT ILIR	LINGGA KUAMANG	1	2	3	4	4	1	53,49
PELEPAT ILIR	DANAU	1	1	5	4	5	1	51,28
RANTAU PANDAN	LUBUK KAYU ARO	6	3	1	4	1	4	52,86
MUKO-MUKO BATHIN VII	MANGUN JAYO	1	5	1	4	2	2	50,51
BATHIN III ULU	SUNGAI TELANG	6	5	1	4	1	2	48,74
TANAH SEPENGGAL	TANJUNG	1	2	1	4	2	2	50,99
TANAH SEPENGGAL	TELENTAM	1	6	1	4	1	1	50,67
TANAH SEPENGGAL	PASAR RANTAU EMBAC	6	5	1	4	1	1	48,65
TANAH SEPENGGAL	TANAH BEKALI	6	2	3	4	3	1	48,58
TANAH SEPENGGAL LINTAS	LUBUK LANDAI	5	1	1	4	2	1	50,75
TANAH SEPENGGAL LINTAS	PAKU AJI	5	5	1	4	3	1	52,77
TANAH TUMBUH	RENAH JELMU	5	5	2	4	1	4	51,52
LIMBUR LUBUK MENGKUANG	BARU LUBUK MENGKUANG	1	5	1	4	4	3	53,31
JUJUHAN	UJUNG TANJUNG	1	1	2	4	3	3	53,54
JUJUHAN	RANTAU PANJANG	1	2	1	4	4	1	52,11
JUJUHAN	JUMBAK	4	1	1	4	4	1	49,49
JUJUHAN	BARU BALAI PANJANG	1	3	2	4	2	1	47,75
JUJUHAN ILIR	TEPIAN DANTO	1	5	2	4	2	2	52,99

Prioritas 1. Sangat Rentan ■
 Prioritas 2. Rentan ■
 Prioritas 3. Agak Rentan ■
 Prioritas 4. Agak Tahan ■
 Prioritas 5. Tahan ■
 Prioritas 6. Sangat Tahan ■

BAB 6

REKOMENDASI KEBIJAKAN

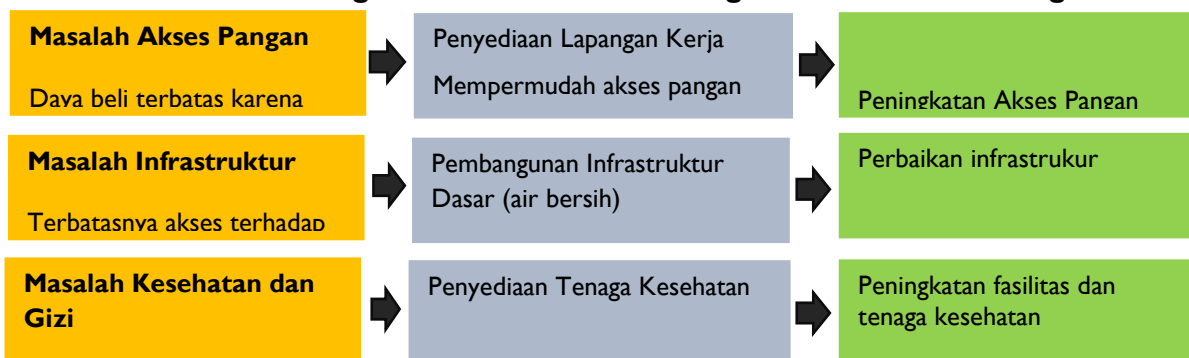
Penyebab kerentanan terhadap kerawanan pangan pada suatu wilayah berbeda dengan wilayah lainnya, dengan demikian cara penyelesaiannya juga berbeda. Peta ini membantu memahami keadaan diantara wilayah (desa), dan dengan demikian akan membantu para pengambil kebijakan untuk dapat menentukan langkah-langkah yang tepat dalam menangani isu-isu ketahanan pangan yang relevan di wilayahnya.

Fokus lokasi penanganan kerentanan pangan di wilayah desa diprioritaskan pada:

- a. Desa-desanya prioritas 1-3 yang tersebar di Kecamatan.
- b. Desa-desanya yang lokasinya jauh dari ibu kota Kabupaten atau di wilayah yang berbatasan dengan Kabupaten lain
- c. Desa-desanya di trisiolir yang menghadapi kendala akses fisik terhadap sumber pangan.
- d. Desa-desanya pemekaran yang fasilitas, infrastruktur dan kapasitas SDMnya masih terbatas.

Upaya-upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan ditekankan pada penyebab utama kerentanan pangan di desa seperti digambarkan pada diagram di bawah ini.

Gambar 6.1 Kerangka Intervensi untuk Meningkatkan Ketahanan Pangan



Program-program peningkatan ketahanan pangan dan penanganan kerentanan pangan wilayah Kabupaten diarahkan pada kegiatan:

- a. Peningkatan penyediaan pangan di daerah non sentra produksi dengan mengoptimalkan sumberdaya pangan lokal.
- b. Pembukaan lahan pertanian pertanian baru
- c. Penanganan kemiskinan melalui penyediaan lapangan kerja, padat karya, redistribusi lahan; pembangunan infrastruktur dasar (jalan, air bersih), dan pemberian bantuan sosial; serta pembangunan usaha produktif/UMKM/padat karya untuk menggerakkan ekonomi wilayah.
- d. Peningkatan akses air bersih melalui penyediaan fasilitas dan layanan air bersih; sosialisasi dan penyuluhan.
- e. Penyediaan tenaga kesehatan.
- f. Pengadaan Cadangan Pangan Daerah, Dusun dan Kelompok Masyarakat.